



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 31 Desember 2020

Halaman: 2

# Dorong Pendataan KSJPS dengan IT

## Antisipasi Ketidaktepatan Sasaran Penerima

**IOGJA, Radar Jogja** - Kalangan legislator DPRD Kota Jogja menilai masih ada ketidaktepatan sasaran dalam menjangkau pendataan kartu Keluarga Menuju Sejahtera (KMS) atau kini Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS). Hal ini difaktori masih adanya pendataan yang diakses secara manual.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja, Krisnadi Setyawan mengatakan, dalam evaluasi kinerja 2020 untuk menjalankan fungsi pengawasan anggaran dan legis-

latif. Selama ini, menilai ketepatan pendataan KMS masih bertumpu pada usulan RT dan evaluasi Dinas Sosial Kota Jogja. Sehingga masih memungkinkan adanya ketidaktepatan sasaran. "Banyaknya masukan tentang ketidaktepatan penerima KPS," katanya kemarin (30/12).

Krisnadi menjelaskan, parameter ketepatan data ini yang belum bisa termonitoring dan evaluasi yang komprehensif bisa diakses publik. Sebab, masih secara manual. Padahal, data kemiskinan sebagai acuan KSJPS harus menggunakan data riil bukan turunan kebijakan Kemendagri dalam pedoman penyusunan APBDY Terlebihi, pagedulak korona telah meningkatkan angka kemiskinan.

"Ini perlu adanya perluasan KSJPS terutama pada data kemiskinan desil 3 dan 4," ujarnya. "Karena kalau aturan baku KMS yang dipakai bisa jadi kurang dari 10 persen dari jumlah KK kota yang dapat," lanjut politisi Partai Gerindra itu.

Karena itu, masukan Komisi D untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya keterbukaan sistem data, terutama penggunaan IT sebagai upaya monitoring dan evaluasi publik. "Karena pendataan sekarang sudah pakai IT maka kita minta untuk terbuka kepada publik" terangnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Data Informasi dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kota Jogja, Esti Setyanti mengatakan jumlah data calon KSJPS tahun 2021 masih dilakukan verifikasi pada uji publik kedua ini. "Saat ini masih proses pengolahan data," katanya.

Uji publik yang dilakukan berbasis pap kelurahan tersebut perlu dilakukan untuk memastikan KSJPS diterima oleh keluarga yang membutuhkan. Karena masih dalam situasi pandemi Covid-19 direncanakan uji publik tidak dilakukan tatap muka melainkan dengan surat yang dikirimkan ke 45 kelurahan. "Tinggalan sesuai form yang kami sediakan nantinya juga dikirimkan melalui surat," tambahnya. (wia/pru/by)

| Instansi        | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Sosial | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

| Instansi        | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Sosial | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 14 September 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005